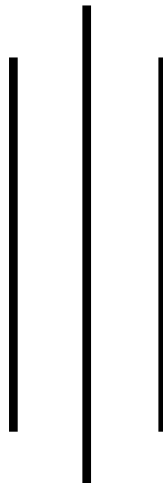




**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

SEKRETARIAT DAERAH



**PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1. Maksud.....	5
1.3.2. Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	44
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Sekretariat Daerah	44
3.2.1. Tujuan Rencana kerja Sekretariat Daerah.....	45
3.2.2. Sasaran Rencana kerja Sekretariat Daerah	46
3.3. Program dan Kegiatan	47
BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V PENUTUP.....	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Tahap ini dilakukan dengan:

- a. membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah;

- b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah;
 - c. menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
 - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana kerja dan pendanaan
 - V. Penutup

6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kota Pematang Siantar kepada Walikota Pematang Siantar melalui Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pematang Siantar.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 3 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar adalah untuk ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024 yang akan dibiayai APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.
- b. Menyediakan satu parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Sekretariat Daerah dalam memahami arah dan tujuan yang hendak dicapai.
- d. Memudahkan seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran Sekretariat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program rentang waktu 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar terdiri dari 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan;

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar melaksanakan 3 program, 19 kegiatan dan 55 sub kegiatan sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
		4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		Air dan Listrik
		6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		7.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		8.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		8.3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		8.4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		9.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		9.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		9.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
		10. Penataan Organisasi
		10.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		10.2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		10.3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		11.1. Fasilitasi Keprotokolan
		11.2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		11.3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
		1. Administrasi Tata Pemerintahan
		1.1. Penataan Administrasi Pemerintahan
		1.2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		2.1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		2.2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		2.3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		3.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		3.2. Fasilitasi Bantuan Hukum
		3.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum
		4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
		4.1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		4.2. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
		1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		1.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		1.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
		2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		2.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		2.2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		2.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		3.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		3.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
		3.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		4.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022, ada beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, ditargetkan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda empat, terealisasi 1 (satu) kendaraan roda empat.

2. Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terealisasi untuk 1 (satu) orang kepala daerah, dikarenakan wakil kepala daerah belum diganti.
3. Sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan, ditargetkan 4 dokumen, yang terealisasi 2 (dua) dokumen
4. Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, ditargetkan 5 kasus yang difasilitasi, terealisasi 4 kasus
5. Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, ditargetkan 8 dokumen sebagai output, terealisasi 5 (lima) dokumen

Demikian juga ada beberapa sub kegiatan yang melebihi target kinerja sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, ditargetkan untuk 135 orang ASN, dan terealisasi sebanyak 139 orang ASN.
2. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, ditargetkan 300 produk hukum yang disusun, dan terealisasi sebanyak 825 produk hukum
3. Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, ditargetkan 300 produk hukum yang didokumentasikan, dan terealisasi sebanyak 825 produk hukum.

Realisasi Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022 seperti dalam tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1

Tabel T.C – 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
		Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC (>50-55)	-	-	-	-	CC (>50-55)	belum rilis	-

4.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang diselesaikan tepat waktu</i>	100	-	-	-	-	100	25,00	25,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	0	0	0	-	6	1	16,67
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	0	0	-	4	1	25,00
4.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi keuangan dalam kategori baik</i>	100	-	-	-	-	100	25,00	25,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	0	0	0	-	140	140	100,00
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16	0	0	0	-	16	4	25,00
4.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase orang yang mendapat pemahaman hukum</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-

4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	0	0	0	-	100	0	-
4.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelayanan administrasi umum dalam kategori baik</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	-	1	1	100,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	-	1	1	100,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	0	0	0	-	2	2	100,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	0	0	0	-	5	5	100,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	0	0	-	1	1	100,00

4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0	0	0	-	1	1	100,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	0	0	0	-	1	1	100,00
4.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	0	0	0	-	2	0	-
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	0	0	0	-	10	0	-
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	0	0	0	-	20	0	-

4.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lancar</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	0	0	0	-	3	3	100,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	-	1	1	100,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	-	1	1	100,00
4.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00

4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47	0	0	0	-	47	28	59,57
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95	0	0	0	-	95	0	-
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	0	0	0	-	10	0	-
4.01.01.2.11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah kategori baik</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	0	0	0	-	2	1	50,00

4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	0	0	0	-	6	1	16,67
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	0	0	0	-	2	0	-
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	0	0	0	-	2	0	-
4.01.01.2.12	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah kategori baik</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3	0	0	0	-	3	3	100,00

4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	0	0	0	-	3	3	100,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3	0	0	0	-	3	3	100,00
4.01.01.2.13	<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Nilai komponen pelaporan kinerja pada penilaian SAKIP</i>	6,0	-	-	-	-	6,0	<i>belum rilis</i>	-
		<i>Persentase penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu</i>	75,00	-	-	-	-	75,00	75,00	100,00
		<i>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Indeks Kepuasan masyarakat yang bernilai baik</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
		<i>Persentase kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00

		<i>undangan yang berlaku</i>								
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	0	0	0	-	3	3	100,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	0	0	0	-	3	0	-
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	0	0	0	-	2	2	100,00
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	0	0	0	-	1	0	-
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja	1	0	0	0	-	1	1	100,00

		Pemerintah Daerah								
4.01.01.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase fasilitasi kegiatan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi KDH/ WKDH</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50	0	0	0	-	50	50	100,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	50	0	0	0	-	50	50	100,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50	0	0	0	-	50	50	100,00
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.02.2.01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Persentase Kelurahan Beradministrasi Baik</i>	60,00	-	-	-	-	60,00	-	-

		<i>Penyampaian LPPD yang tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>	-	-	-	-	<i>Tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>	100,00
		<i>Penyampaian LKPJ yang tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>	-	-	-	-	<i>Tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>	100,00
		<i>Penyampaian laporan SPM yang tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>	-	-	-	-	<i>Tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>	100,00
		<i>Persentase pilar batas wilayah yang sudah dibangun</i>	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	0	0	0	-	1	1	100,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	0	0	0	-	4	0	-
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	0	0	0	-	5	3	60,00
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00

		<i>Persentase Fasilitasi Terkait Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	0	0	0	-	6	1	16,67
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	0	0	0	-	2	0	-

4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2	0	0	0	-	2	1	50,00
4.01.02.2.03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Persentase produk hukum yang sesuai dengan azas pembentukan produk hukum yang baik</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
		<i>Persentase penyelesaian kasus hukum</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
		<i>Persentase produk hukum yang didokumentasikan</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500	0	0	0	-	500	270	54,00

4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	0	0	0	-	5	2	40,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500	0	0	0	-	500	270	54,00
4.01.02.2.04	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	<i>Persentase Kerja Sama yang Terfasilitasi</i>	100	-	-	-	-	100	25,00	25,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	0	0	0	-	1	1	100,00
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	0	0	0	-	1	0	-
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Perekonomian dan Pembangunan	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.03.2.01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Persentase kebijakan perekonomian yang terlaksana</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00

4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	0	0	0	-	4	1	25,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	0	0	0	-	5	1	20,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	0	0	0	-	4	1	25,00
4.01.03.2.02	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan monitoring evaluasi (Monev) tepat waktu</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
		<i>Persentase SKPD yang melaporkan progres kegiatan fisik tepat waktu</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program	2	0	0	0	-	2	1	50,00

		pembangunan daerah								
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12	0	0	0	-	12	3	25,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	16	0	0	0	-	16	4	25,00
4.01.03.2.03	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan RUP</i>	85,00	-	-	-	-	85,00	15,00	17,65
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	0	0	0	-	12	3	25,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	0	0	0	-	12	3	25,00

4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	0	0	0	-	150	0	-
4.01.03.2.04	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	<i>Persentase kegiatan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana</i>	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4	0	0	0	-	4	1	25,00

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Pematang Siantar selama tahun 2022 antara lain disebabkan :

- Masih terdapat realisasi kinerja program dan kegiatan yang tidak mencapai target. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan sumber dana yang tersedia sehingga tidak semua program/kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir.
- Sebaliknya ditemukan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra melebihi target, akibat munculnya kegiatan yang tidak direncanakan di tahun renstra. Kegiatan ini muncul karena dianggap penting dan mendesak.
- Masih rendahnya kualitas perencanaan OPD, sehingga perencanaan dan penganggaran cenderung tidak konsisten mengakibatkan program dan kegiatan yang direncanakan tidak terakomodir dalam proses penganggaran.
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah dan Rancangan Rencana Kerja perangkat daerah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah :

- Melaksanakan reviu terhadap target indikator kinerja pada renstra
- Meningkatkan koordinasi dengan OPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi rencana kerja OPD setiap triwulan secara tepat waktu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2.

TABEL T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah (Tahun)				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	C (>42,39-45)	C (>45-50)	CC (>50-60)	B (>60-65)	C (>42,39-45)	0	CC (>50-60)	B (>60-65)	
2	Predikat/Skor AKIP tingkat Kota	CC (>40,57-50)	CC (>50-55)	CC (>55-60)	B (>60-65)	C (>40,57-50)	0	CC (>55-60)	B (>60-65)	
3	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi (3,50-3,60)	Tinggi (3,61-3,80)	Tinggi (3,81-4,00)	Tinggi	0	Tinggi (3,61-3,80)	Tinggi (3,81-4,00)	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	50,00	60,00	70,00	75,00	50,00	0	70,00	75,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	C (73,36-76,6)	B (76,61-78)	B (78-80)	B (80-82)	C (73,36-76,6)	0	B (78-80)	B (80-82)	
6	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	n/a	B (76,61-78)	B (78-80)	B (80-82)	n/a	0	B (78-80)	B (80-82)	

Realisasi masing-masing indikator sasaran diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil keputusan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, yaitu Permenpan RB Nomor 26 tahun 2020
2. Predikat/Skor AKIP tingkat Kota, dinilai berdasarkan Penilaian Kemenpan RB, berdasarkan dengan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021
3. Nilai LPPD dinilai berdasarkan penilaian Tim Daerah Provinsi, berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dinilai berdasarkan penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), sesuai dengan surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik
5. Indeks Kepuasan Masyarakat dinilai berdasarkan Hasil survei pengukuran IKM Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik, berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dijabarkan di atas, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Kota Pematang Siantar dalam melaksanakan pelayanan tugas dan fungsinya, permasalahan tersebut antara lain seperti sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang masih rendah
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggara pelayanan publik
3. Kualitas pelayanan Sekretariat Daerah yang belum optimal

Adapun isu strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, yaitu :

1. Responsifitas SKPD dalam penyampaian laporan dan data yang dibutuhkan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik dengan Instansi Pemerintah maupun dengan lembaga lainnya;
3. Pelayanan administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
4. Penentuan batas wilayah Kabupaten/Kota;
5. Sarana dan prasarana pada beberapa unit ker3ja bagian;
6. Kualitas penyusunan produk hukum, Penyelesaian kasus hukum dan penyebarluasan produk hukum daerah;
7. Kompetensi SDM pada beberapa unit kerja bagian;
8. Informasi tentang terbitnya peraturan perundang- undangan terbaru mengenai analis kelembagaan, Anjab, ABK, Pengolah data Ketatalaksanaan yang bersifat dinamis;
9. Pengelolaan dan pengembangan BUMD dan BLUD serta ekonomi mikro kecil;
10. Tata kelola surat-menyurat dan pengelolaan asset.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar adalah “Terwujudnya peningkatan dukungan sekretariat daerah kota pematang siantar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap Rancangan RKPD adalah membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam Rancangan RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Tabel T-C.31. Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kota Pematang Siantar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100,00	34.260.665.248	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</i>		100,00	32.725.858.537	
			<i>Capaian AKIP Perangkat Daerah</i>	CC (>55-60)				CC (>55-60)		
1.1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang diselesaikan tepat waktu</i>	100,00	100.000.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		100,00	100.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	85.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pematang Siantar	7 dokumen	85.000.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pematang Siantar	4 laporan	15.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatorif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatorif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100,00	14.783.894.027	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		100,00	14.783.894.027	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pematang Siantar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang/ Bulan	13.969.356.527	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pematang Siantar	140 orang/ Bulan	13.969.356.527	
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16 Dokumen	814.537.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pematang Siantar	16 Dokumen	814.537.500	
1.3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase orang yang mendapat pemahaman hukum</i>	100,00	100.000.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		100,00	30.500.000	
1.3.1	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Pematang Siantar	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 orang	100.000.000	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Pematang Siantar	150 orang	30.500.000	
1.4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pelayanan administrasi umum dalam kategori baik</i>	100,00	7.982.162.000	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100,00	7.180.825.819	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pematang Siantar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	282.550.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pematang Siantar	1 paket	232.550.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pematang Siantar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	169.999.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pematang Siantar	1 paket	169.999.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pematang Siantar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	297.597.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pematang Siantar	2 paket	297.597.000	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pematang Siantar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	2.070.450.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pematang Siantar	5 paket	2.070.450.000	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pematang Siantar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	393.289.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pematang Siantar	1 paket	313.289.000	
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	80.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pematang Siantar	1 laporan	80.000.000	
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	4.688.277.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pematang Siantar	1 laporan	4.016.940.819	
1.5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana</i>	<i>100,00</i>	<i>910.434.507</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>100,00</i>	<i>910.434.507</i>	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pematang Siantar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	339.214.507	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pematang Siantar	2 unit	339.214.507	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pematang Siantar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	120.260.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pematang Siantar	10 unit	120.260.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pematang Siantar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	450.960.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pematang Siantar	20 unit	450.960.000	
1.6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lancar</i>	<i>100,00</i>	<i>5.030.398.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>100,00</i>	<i>4.830.398.000</i>	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	977.317.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pematang Siantar	3 laporan	977.317.000	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.443.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pematang Siantar	1 laporan	1.443.600.000	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.609.481.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pematang Siantar	1 laporan	2.409.481.000	
1.7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana</i>	<i>100,00</i>	<i>1.700.174.000</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>100,00</i>	<i>1.700.174.000</i>	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pematang Siantar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	49 unit	981.910.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pematang Siantar	49 unit	981.910.000	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pematang Siantar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 unit	118.264.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pematang Siantar	120 unit	118.264.000	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pematang Siantar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	600.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pematang Siantar	10 unit	600.000.000	
2.1	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>		<i>Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah kategori baik</i>	<i>100,00</i>	<i>828.074.000</i>	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>		<i>100,00</i>	<i>828.074.000</i>	
2.1.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Pematang Siantar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	162.514.000	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Pematang Siantar	2 Orang/Bulan	162.514.000	
2.1.1.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 paket	115.560.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pematang Siantar	6 paket	115.560.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1.	Pelaksanaan medical cek up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Pematang Siantar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	100.000.000	Pelaksanaan medical cek up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Pematang Siantar	2 Orang	100.000.000	
2.1.1.	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Pematang Siantar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	450.000.000	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Pematang Siantar	2 Orang/Bulan	450.000.000	
2.2.	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>		<i>Persentase fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah kategori baik</i>	<i>100,00</i>	<i>1.294.519.000</i>	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>		<i>100,00</i>	<i>944.519.000</i>	
2.2.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	681.300.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pematang Siantar	3 Paket	681.300.000	
2.2.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	410.388.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pematang Siantar	3 Paket	210.388.000	
2.2.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket	202.831.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pematang Siantar	3 Paket	52.831.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.	<i>Penataan Organisasi</i>		<i>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Indeks Kepuasan masyarakat yang bernilai baik</i>	100,00	543.770.000	<i>Penataan Organisasi</i>		100,00	503.189.000	
			<i>Persentase kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>	100,00				100,00		
			<i>Persentase penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu</i>	80,00				80,00		
2.3.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 dokumen	105.450.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pematang Siantar	3 dokumen	105.450.000	
2.3.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 laporan	101.910.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pematang Siantar	3 laporan	61.329.000	
2.3.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	136.410.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pematang Siantar	2 dokumen	136.410.000	
2.3.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	1 dokumen	100.000.000		Pematang Siantar	1 dokumen	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Publik dan Tata Laksana							
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	100.000.000		Pematang Siantar	1 dokumen	100.000.000	
2.4.	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>		<i>Persentase fasilitasi kegiatan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi KDH/WKDH</i>	<i>100,00</i>	<i>987.239.714</i>	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>		<i>100,00</i>	<i>913.850.184</i>	
2.4.1	Fasilitasi Keprotokolan	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60 laporan	487.506.000	Fasilitasi Keprotokolan	Pematang Siantar	60 laporan	462.946.000	
2.4.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60 laporan	100.581.874	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pematang Siantar	60 laporan	76.021.000	
2.4.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60 laporan	399.151.840	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pematang Siantar	60 laporan	374.883.184	
3.	<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>		<i>Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>100,00</i>	<i>10.596.651.097</i>	<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>		<i>100,00</i>	<i>10.267.341.097</i>	
3.1.	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>		<i>Persentase Kelurahan Beradministrasi Baik</i>	<i>65,00</i>	<i>1.282.700.000</i>	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>		<i>65,00</i>	<i>1.230.700.000</i>	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Penyampaian LPPD yang tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>				<i>Tepat waktu</i>		
			<i>Penyampaian LKPJ yang tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>				<i>Tepat waktu</i>		
			<i>Penyampaian laporan SPM yang tepat waktu</i>	<i>Tepat waktu</i>				<i>Tepat waktu</i>		
			<i>Persentase pilar batas wilayah yang sudah dibangun</i>	<i>75,00</i>				<i>75,00</i>		
3.1.1	penataan Administrasi Pemerintahan	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	252.500.000	penataan Administrasi Pemerintahan	Pematang Siantar	1 dokumen	236.500.000	
3.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 dokumen	505.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pematang Siantar	4 dokumen	455.000.000	
3.1.3	Fasilitasi pelaksanaan otonomi Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	525.200.000	Fasilitasi pelaksanaan otonomi Daerah	Pematang Siantar	5 dokumen	539.200.000	
3.2.	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>		<i>Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi</i>	<i>100,00</i>	<i>8.029.752.500</i>	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>		<i>100,00</i>	<i>7.829.782.500</i>	
			<i>Persentase Fasilitasi Terkait Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana</i>	<i>100,00</i>				<i>100,00</i>		
3.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina	6 dokumen	1.319.767.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pematang Siantar	6 dokumen	1.907.971.932	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mental Spiritual							
3.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	6.419.560.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pematang Siantar	2 dokumen	5.599.722.791	
3.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	2 dokumen	290.425.500	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pematang Siantar	2 dokumen	322.087.777	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kearsipan, Trantibum Linmas							
3.3.	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>		<i>Persentase produk hukum yang sesuai dengan azas pembentukan produk hukum yang baik</i>	100,00	1.010.000.000	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>		100,00	996.660.000	
			<i>Persentase penyelesaian kasus hukum</i>	100,00				100,00		
			<i>Persentase produk hukum yang didokumentasikan</i>	100,00				100,00		
3.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pematang Siantar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 dokumen	404.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pematang Siantar	500 dokumen	404.000.000	
3.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pematang Siantar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 kasus	404.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pematang Siantar	5 kasus	400.500.000	
3.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pematang Siantar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 dokumen	202.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pematang Siantar	500 dokumen	192.160.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Kerja Sama yang Terealisasi	100,00	274.198.597	Fasilitasi Kerjasama Daerah		100,00	210.198.597	
3.4.1	Fasilitasi kerja sama Dalam Negeri	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 dokumen	264.098.597	Fasilitasi kerja sama Dalam Negeri	Pematang Siantar	1 dokumen	200.098.597	
3.4.2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	10.100.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pematang Siantar	1 laporan	10.100.000	
4.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Perekonomian dan Pembangunan	100,00	2.408.254.100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100,00	2.198.858.836	
4.1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase kebijakan perekonomian yang terlaksana	100,00	346.664.320	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100,00	311.232.000	
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 dokumen	123.521.990	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pematang Siantar	4 dokumen	111.299.000	
4.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pematang Siantar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 laporan	61.883.710	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pematang Siantar	5 laporan	53.271.000	
4.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	161.258.620	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pematang Siantar	4 dokumen	146.662.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3.	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>		<i>Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan monitoring evaluasi (Monev) tepat waktu</i>	100,00	479.750.000	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>		100,00	414.780.000	
			<i>Persentase SKPD yang melaporkan progres kegiatan fisik tepat waktu</i>	100,00				100,00		
4.3.1	fasilitasi penyusunan program pembangunan	Pematang Siantar	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	2 dokumen	90.900.000	fasilitasi penyusunan program pembangunan	Pematang Siantar	2 dokumen	90.900.000	
4.3.2	pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Pematang Siantar	jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 laporan	111.100.000	pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Pematang Siantar	12 laporan	111.100.000	
4.3.3	pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Pematang Siantar	jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	16 laporan	277.750.000	pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Pematang Siantar	16 laporan	212.780.000	
4.4.	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>		<i>Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan RUP</i>	90,00	1.259.470.000	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>		90,00	1.164.975.099	
4.4.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	315.120.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pematang Siantar	12 dokumen	315.120.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 dokumen	464.600.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pematang Siantar	12 dokumen	420.605.099	
4.4.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pematang Siantar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 orang	479.750.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pematang Siantar	150 orang	429.250.000	
4.2.	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>		<i>Persentase kegiatan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana</i>	<i>100,00</i>	<i>322.369.780</i>	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>		<i>100,00</i>	<i>307.871.737</i>	
4.2.1	koordinasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 dokumen	322.369.780	koordinasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Pematang Siantar	4 dokumen	307.871.737	
JUMLAH						47.265.570.445			45.192.058.470	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar senantiasa menambah usulam program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD, dari penelitian lapangan dan penagamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum Bappeda. Pada tahun 2022 tidak ada usulan program/kegiatan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi dan perguruan tinggi. Usulan yang disampaikan hanya bersifat masukan maupun harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, serta mengefektifkan pelaksanaan tugas perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Sekretariat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, yaitu di akhir masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih. Perumusan tujuan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Pematang Siantar tahun 2022 – 2027 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Tujuan perangkat daerah juga menjawab permasalahan pokok/isu strategis perangkat daerah sebagai bagian dari permasalahan pembangunan/isu strategis daerah.

Seiring dengan pelantikan Kepala Daerah terpilih periode 2022-2027, maka telah ditetapkan visi, misi, prioritas, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD 2022-2027 adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas

penggambaran visi yang ingin dicapai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah. Misi pembangunan daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemic Covid-19
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif, melayani dengan prinsip *good governance* dan *corporate governance*
4. Meningkatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian kota sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara
5. Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan

Dari kelima misi tersebut, Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar berkaitan langsung dengan misi ke-3 dalam hal peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

3.2.1. Tujuan Rencana kerja Sekretariat Daerah

Adapun tujuan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 adalah *Terwujudnya Peningkatan Dukungan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*, dan sasarannya adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

3.2.2. Sasaran Rencana kerja Sekretariat Daerah

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1.	Terwujudnya peningkatan dukungan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	CC (>50-60)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat/skor AKIP tingkat kota	CC (>55-60)
			Nilai LPPD	Tinggi (3,61-3,80)
			Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	70,00
		Meningkatnya kualitas penyelenggara pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	B (78-80)
		Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	B (78-80)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024. Usulan dan rumusan Rancangan Rencana Kerja Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar untuk Tahun 2024 meliputi 3 program, 19 kegiatan, dan 57 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1.1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5. Fasilitasi kunjungan tamu
 - 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.6. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.9.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.9.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.9.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.10.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.10.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.10.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.11. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1.11.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1.11.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1.11.3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1.11.4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1.12. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 1.12.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 1.12.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 1.12.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

- 1.13. Penataan Organisasi
 - 1.13.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1.13.2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 1.13.3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 1.13.4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 1.13.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

- 1.14. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1.14.1. Fasilitasi Keprotokolan
 - 1.14.2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 1.14.3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

- 2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 2.1. Administrasi Tata Pemerintahan
 - 2.1.1. Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 2.1.2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 2.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

 - 2.2. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
 - 2.2.1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual
 - 2.2.2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - 2.2.3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

 - 2.3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - 2.3.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

- 2.3.2. Fasilitasi Bantuan Hukum
- 2.3.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

- 2.4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 2.4.1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - 2.4.2. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

- 3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - 3.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - 4.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - 4.1.2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - 4.1.3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

 - 3.2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - 3.2.1. Fasilitasi penyusunan program Pembangunan
 - 3.2.2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - 3.2.3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

 - 3.3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3.3.1. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
 - 3.3.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 3.3.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

 - 3.4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - 3.4.1. Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Kota Pematang Siantar

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.01.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		100,00	32.725.858.537	DAU		100,00	34.603.271.901
		<i>Capaian AKIP Perangkat Daerah</i>		CC (>55-60)		DAU		B (>60-65)	
4.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang diselesaikan tepat waktu</i>		100,00	100.000.000	DAU		100,00	100.000.000
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pematang Siantar	7 dokumen	85.000.000	DAU		7 dokumen	85.000.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pematang Siantar	4 laporan	15.000.000	DAU		4 laporan	15.000.000
4.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat</i>		100,00	14.783.894.027	DAU		100,00	14.783.894.027

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
		<i>Daerah</i>							
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pematang Siantar	140 orang/ Bulan	13.969.356.527	DAU		140 orang/ Bulan	13.969.356.527
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pematang Siantar	16 Dokumen	814.537.500	DAU		16 Dokumen	814.537.500
4.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase orang yang mendapat pemahaman hukum</i>		100,00	30.500.000	DAU		100,00	100.000.000
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pematang Siantar	150 orang	30.500.000	DAU		150 orang	100.000.000
4.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelayanan administrasi umum dalam kategori baik</i>		100,00	7.180.825.819	DAU		100,00	7.982.162.000
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pematang Siantar	1 paket	232.550.000	DAU		1 paket	282.550.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pematang Siantar	1 paket	169.999.000	DAU		1 paket	169.999.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pematang Siantar	2 paket	297.597.000	DAU		2 paket	297.597.000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pematang Siantar	5 paket	2.070.450.000	DAU		5 paket	2.070.450.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pematang Siantar	1 paket	313.289.000	DAU		1 paket	393.289.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pematang Siantar	1 laporan	80.000.000	DAU		1 laporan	80.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pematang Siantar	1 laporan	4.016.940.819	DAU		1 laporan	4.688.277.000
4.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana</i>		100,00	910.434.507	DAU		100,00	1.253.041.160
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pematang Siantar	2 unit	339.214.507	DAU		2 unit	681.821.160
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Pematang Siantar	10 unit	120.260.000	DAU		10 unit	120.260.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
		Lainnya yang Disediakan							
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pematang Siantar	20 unit	450.960.000	DAU		20 unit	450.960.000
4.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lancar</i>		100,00	4.830.398.000	DAU		100,00	5.030.398.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pematang Siantar	3 laporan	977.317.000	DAU		3 laporan	977.317.000
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pematang Siantar	1 laporan	1.443.600.000	DAU		1 laporan	1.443.600.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pematang Siantar	1 laporan	2.409.481.000	DAU		1 laporan	2.609.481.000
4.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan</i>		100,00	1.700.174.000	DAU		100,00	1.700.174.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
		<i>prasarana</i>							
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pematang Siantar	49 unit	981.910.000	DAU		49 unit	981.910.000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pematang Siantar	120 unit	118.264.000	DAU		120 unit	118.264.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pematang Siantar	10 unit	600.000.000	DAU		10 unit	600.000.000
4.01.01.2.11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah kategori baik</i>		100,00	828.074.000	DAU		100,00	828.074.000
4.01.01.2.11.01	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pematang Siantar	2 Orang/Bulan	162.514.000	DAU		2 Orang/Bulan	162.514.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Pematang Siantar	6 paket	115.560.000	DAU		6 paket	115.560.000
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pematang Siantar	2 Orang	100.000.000	DAU		2 Orang	100.000.000
4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pematang Siantar	2 Orang/Bulan	450.000.000	DAU		2 Orang/Bulan	450.000.000
4.01.01.2.12	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah kategori baik</i>		100,00	944.519.000	DAU		100,00	1.294.519.000
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Pematang Siantar	3 Paket	681.300.000	DAU		3 Paket	681.300.000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Pematang Siantar	3 Paket	210.388.000	DAU		3 Paket	410.388.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Pematang Siantar	3 Paket	52.831.000	DAU		3 Paket	202.831.000
4.01.01.2.13	<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Indeks Kepuasan masyarakat yang bernilai baik</i>		100,00	503.189.000	DAU		100,00	543.770.000
		<i>Persentase kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>		100,00		DAU		100,00	
		<i>Persentase penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu</i>		80,00		DAU		80,00	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pematang Siantar	3 dokumen	105.450.000	DAU		3 dokumen	105.450.000
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pematang Siantar	3 laporan	61.329.000	DAU		3 laporan	101.910.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pematang Siantar	2 dokumen	136.410.000	DAU		2 dokumen	136.410.000
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pematang Siantar	1 dokumen	100.000.000	DAU		1 dokumen	100.000.000
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pematang Siantar	1 dokumen	100.000.000	DAU		1 dokumen	100.000.000
4.01.01.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase fasilitasi kegiatan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi KDH/WKDH</i>		100,00	913.850.184	DAU		100,00	987.239.714
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Pematang Siantar	60 laporan	462.946.000	DAU		72 laporan	487.506.000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pematang Siantar	60 laporan	76.021.000	DAU		72 laporan	100.581.874
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pematang Siantar	60 laporan	374.883.184	DAU		72 laporan	399.151.840

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100,00	10.267.341.097	DAU		100,00	10.702.617.608
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Kelurahan Beradministrasi Baik		65,00	1.230.700.000	DAU		70,00	1.295.527.000
		Penyampaian LPPD yang tepat waktu		Tepat waktu		DAU		Tepat waktu	
		Penyampaian LKPJ yang tepat waktu		Tepat waktu		DAU		Tepat waktu	
		Penyampaian laporan SPM yang tepat waktu		Tepat waktu		DAU		Tepat waktu	
		Persentase pilar batas wilayah yang sudah dibangun		75,00		DAU		100,00	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Pematang Siantar	1 dokumen	236.500.000	DAU		1 dokumen	255.025.000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pematang Siantar	4 dokumen	455.000.000	DAU		4 dokumen	510.050.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pematang Siantar	5 dokumen	539.200.000	DAU		5 dokumen	530.452.000
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi</i>		100,00	7.829.782.500	DAU		100,00	8.110.050.025
		<i>Persentase Fasilitasi Terkait Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana</i>		100,00		DAU		100,00	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pematang Siantar	6 dokumen	1.907.971.932	DAU		6 dokumen	1.332.964.670
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	Pematang Siantar	2 dokumen	5.599.722.791	DAU		2 dokumen	6.483.755.600

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
		Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pematang Siantar	2 dokumen	322.087.777	DAU		2 dokumen	293.329.755

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.02.2.03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Persentase produk hukum yang sesuai dengan azas pembentukan produk hukum yang baik</i>		100,00	996.660.000	DAU		100,00	1.020.100.000
		<i>Persentase penyelesaian kasus hukum</i>		100,00		DAU		100,00	
		<i>Persentase produk hukum yang didokumentasikan</i>		100,00		DAU		100,00	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Pematang Siantar	500 dokumen	404.000.000	DAU		500 dokumen	408.040.000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Pematang Siantar	5 kasus	400.500.000	DAU		5 kasus	408.040.000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Pematang Siantar	500 dokumen	192.160.000	DAU		500 dokumen	204.020.000
4.01.02.2.04	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	<i>Persentase Kerja Sama yang Terfasilitasi</i>		100,00	210.198.597	DAU		100,00	276.940.583
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi kerja sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pematang Siantar	1 dokumen	200.098.597	DAU		1 dokumen	266.739.583
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	Pematang Siantar	1 laporan	10.100.000	DAU		1 laporan	10.201.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
		Pelaksanaan Kerja Sama							
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Perekonomian dan Pembangunan		100,00	2.198.858.836	DAU		100,00	2.432.336.641
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang terlaksana		100,00	311.232.000	DAU		100,00	350.130.963
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pematang Siantar	4 dokumen	111.299.000	DAU		4 dokumen	124.757.210
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pematang Siantar	5 laporan	53.271.000	DAU		5 laporan	62.502.547
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pematang Siantar	4 dokumen	146.662.000	DAU		4 dokumen	162.871.206

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.03.2.02	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan monitoring evaluasi (Monev) tepat waktu</i>		100,00	414.780.000	DAU		100,00	484.547.500
		<i>Persentase SKPD yang melaporkan progres kegiatan fisik tepat waktu</i>		100,00		DAU		100,00	
4.01.03.2.02.01	fasilitasi penyusunan program pembangunan	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Pematang Siantar	2 dokumen	90.900.000	DAU		2 dokumen	91.809.000
4.01.03.2.02.02	pengendalian dan evaluasi program pembangunan	jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Pematang Siantar	12 laporan	111.100.000	DAU		12 laporan	112.211.000
4.01.03.2.02.03	pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Pematang Siantar	16 laporan	212.780.000	DAU		16 laporan	280.527.500
4.01.03.2.03	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan RUP</i>		90,00	1.164.975.099	DAU		95,00	1.272.064.700
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pematang Siantar	12 dokumen	315.120.000	DAU		12 dokumen	318.271.200

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif (Rp *)
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pematang Siantar	12 dokumen	420.605.099	DAU		12 dokumen	469.246.000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pematang Siantar	150 orang	429.250.000	DAU		150 orang	484.547.500
4.01.03.2.04	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	<i>Persentase kegiatan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana</i>		100,00	307.871.737	DAU		100,00	325.593.478
4.01.03.2.04.01	koordinasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Pematang Siantar	4 dokumen	307.871.737	DAU		4 dokumen	325.593.478
	Jumlah				45.192.058.470				47.738.226.150

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar mengusulkan anggaran dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp. 45.192.058.470,- yang terdiri dari 3 program, 19 kegiatan dan 57 sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.32.725.858.537
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp.10.267.341.097
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan sebesar Rp.2.198.858.836
2.408.254.100

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	32.725.858.537
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.783.894.027
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.969.356.527
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	814.537.500
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.500.000
3.1	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	30.500.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.180.825.819
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	232.550.000
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.999.000
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	297.597.000
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.070.450.000
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	313.289.000
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.016.940.819
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	910.434.507

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
	Pemerintah Daerah	
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.214.507
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.260.000
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.960.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.830.398.000
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	977.317.000
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.443.600.000
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.409.481.000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.700.174.000
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	981.910.000
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.264.000
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000
8.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	828.074.000
8.1	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	162.514.000
8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	115.560.000
8.3	Pelaksanaan medical chek up kepala daerah dan wakil kepala daerah	100.000.000
8.4	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	450.000.000
9.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	944.519.000
9.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	681.300.000
9.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	210.388.000
9.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	52.831.000
10.	Penataan Organisasi	503.189.000
10.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	105.450.000
10.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	61.329.000
10.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	136.410.000
10.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000
10.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000
11.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	913.850.184
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	462.946.000
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	76.021.000
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	374.883.184
II.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.267.341.097
1.	Administrasi Tata Pemerintahan	1.230.700.000
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	236.500.000
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	455.000.000
1.3	Fasilitasi pelaksanaan otonomi Daerah	539.200.000
2.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.829.782.500
2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.907.971.932

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	5.599.722.791
2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	322.087.777
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	996.660.000
3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	404.000.000
3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	400.500.000
3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	192.160.000
4.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	210.198.597
4.1	Fasilitasi kerja sama Dalam Negeri	200.098.597
4.2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.100.000
III.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.198.858.836
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	311.232.000
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	111.299.000
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.271.000
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	146.662.000
2.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	414.780.000
2.1	fasilitasi penyusunan program pembangunan	90.900.000
2.2	pengendalian dan evaluasi program pembangunan	111.100.000
2.3	pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	212.780.000
3.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.164.975.099
3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	315.120.000
3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	420.605.099
3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	429.250.000
4.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	307.871.737
4.1	koordinasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	307.871.737
Jumlah		45.192.058.470

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar guna tercapainya visi dan misi Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya rencana kerja (renja), maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Pematang Siantar maupun OPD yang membidangi fungsi lainnya.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar harus terpadu dan sinkron antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program, maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah.

Mudah – mudahan segala sesuatu yang telah direncanakan dengan baik dapat mencapai target yang sesuai dengan harapan kita bersama demi mewujudkan Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.

Pematang Siantar, 4 Juli 2023



Pj. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar

DWI ANTES SUDARTO, SH., MH.

Wakil Ketua Muda

NIP. 19710413 199603 1 002